

# **RENJA**

## **TAHUN 2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO**

**JL. Proklamasi No. 2 Purworejo 54111 Telp/Fax (0275) 325202**

# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2020</b>	10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
	2.4 Review terhadap Rancangan akhir RKPD	35
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	46
	3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	46
	3.2 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah Provinsi Jawa Tengah	46
	3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	47
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	48
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b>	56
<b>LAMPIRAN</b>		

## KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Renja mendukung Visi, Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo, Visi " Purworejo Berdaya Saing 2025 ".

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo mendukung Misi Bupati Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo yaitu "Meningkatkan Daya Saing Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Umkm, Perdagangan, Industri Kerja Serta Potensi Pariwisata Dan Seni Budaya".

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sebagai lembaga yang menyelenggarakan tugas urusan Pemerintah bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi Penanaman Modal, Perizinan dan Data, Sistem Informasi dan Pengaduan telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2022.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2022 menyajikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta informasi tentang rencana capaian kinerja dan rancangan dana indikatif yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.

Purworejo, 14 Juli 2020

Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purworejo

Sekretaris

9 **FITHRI EDHI NUGROHO, SE, MM**

Pembina

NIP. 19760924 199903 1 008

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **A. Pengertian Renja Perangkat Daerah**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **B. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Kabupaten untuk mewujudkan keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

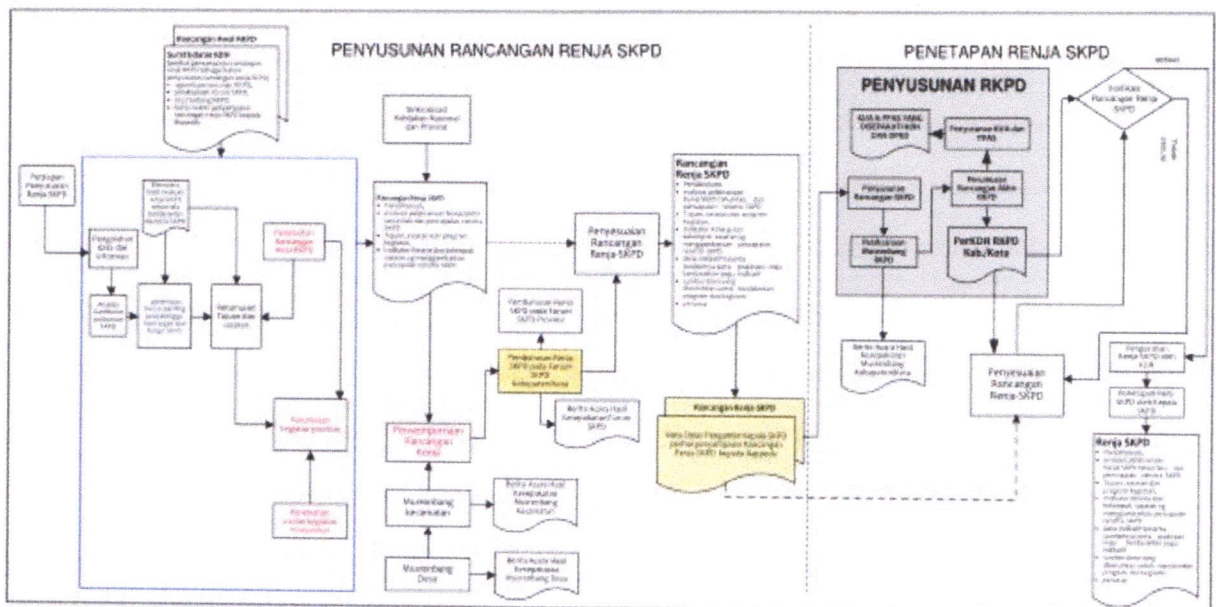
Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif
- c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota



\*Sumber Data : Permendagri 86/2017

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. **Persiapan Penyusunan Renja**
  - Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
  - Orientasi mengenai Renja
  - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja
  - Pengumpulan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- b. Penyusunan Rancangan Renja
- Pengolahan data dan informasi
  - Analisis gambaran pelayanan PD
  - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan
  - Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
  - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
  - Telaah terhadap rancangan RKPD
  - Perumusan tujuan dan sasaran
  - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
  - Perumusan kegiatan prioritas Rencana Kerja
  - Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
  - Penyempurnaan rancangan kerja PD
  - Pembahasan forum PD
  - Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- c. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- d. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- e. Penetapan Renja

Pada perencanaan tahun 2022 ini telah dirintis penggunaan aplikasi SIPD dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022. Implementasi aplikasi SIPD merupakan wujud perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sehingga diharapkan perencanaan dan penganggaran yang disusun lebih akurat dan akuntabel.

Adapun Agenda Kerja yang telah dilalui dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas PMPTSP Kab. Purworejo  
Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>
1.	Persiapan Penyusunan	Minggu ke-1 Januari 2021
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Minggu ke-2 Januari 2021
3.	Forum Perangkat Daerah	Minggu ke-2 Februari 2021
4.	Penyampaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Minggu ke-1 Maret 2021
5.	Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Maret 2021
6.	Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Juli 2021
7.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Juli 2021
8.	Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Akhir Juli 2021

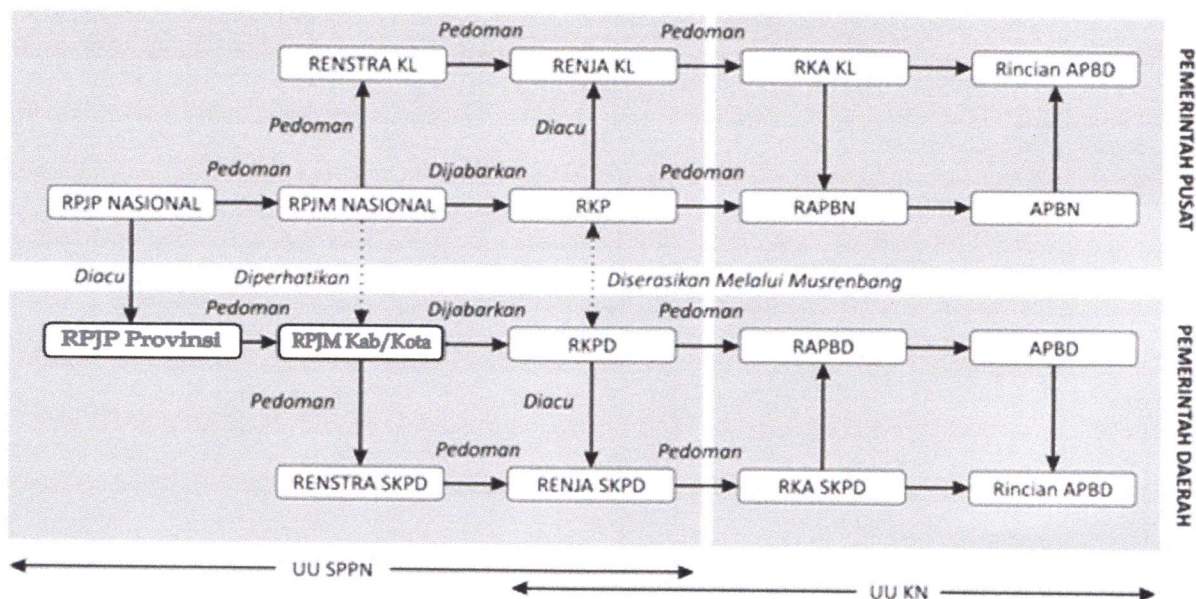
**C. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Perangkat Daerah karena Renstra merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mana RKPD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2016 – 2022 dan mempedomani Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi dasar penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Apabila diilustrasikan dengan gambar, Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.2



\*Sumber Data : Permendagri 86/2017, Permendagri 22/2018

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2022 adalah :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
17. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
18. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2022 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kabupaten dalam rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam Rencana strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).
2. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah.

3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.
4. Menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo pada tahun 2022.

#### **B. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.
3. Mempermudah dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan program / kegiatan dinas tahun 2022.
4. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.
5. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penulisan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja.

**BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

Berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

**BAB V : PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan Renja dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Renja Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengusulkan 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan sebagai berikut :

##### **Program :**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pelayanan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

##### **Kegiatan :**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

10. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
13. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**Sub kegiatan :**

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- d. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- e. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- l. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- m. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- n. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- o. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- p. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

- q. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- r. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- s. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- t. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN  
2020

1. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- 1. Jumlah Anggaran : 2.973.817.414
- 2. Realisasi Anggaran : 2.763.726.251
- 3. Kinerja Anggaran : 92.3%
- 4. Rencana Output : Gaji Pegawai
- 5. Realisasi Output : Gaji Pegawai yang dibayarkan
- 6. Kinerja Output : 100%
- 7. Permasalahan : Ada beberapa pegawai yang pensiun pada tahun 2020
- 8. Solusi : Penyesuaian pada perencanaan selanjutnya

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- 1. Jumlah Anggaran : 2.449.600
- 2. Realisasi Anggaran : 2.449.600
- 3. Kinerja Anggaran : 100 %
- 4. Rencana Output : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) sebanyak 19 dokumen
- 5. Realisasi Output : Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD (bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan) sebanyak 19 dokumen
- 6. Kinerja Output : 100%

- 7. Permasalahan : -
- 8. Solusi : -

2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- 1. Jumlah Anggaran : 26.848.600
- 2. Realisasi Anggaran : 26.839.600
- 3. Kinerja Anggaran : 99.97 %
- 4. Rencana Output : Penyediaan layanan surat-menyurat dan kearsipan
- 5. Realisasi Output : Tersedianya layanan surat-menyurat dan kearsipan
- 6. Kinerja Output : 100%
- 7. Permasalahan :
- 8. Solusi :

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- 1. Jumlah Anggaran : 29.196.000
- 2. Realisasi Anggaran : 25.820.130
- 3. Kinerja Anggaran : 88.44 %
- 4. Rencana Output : Penyediaan rekening langganan telepon, listrik dan air selama 12 bulan
- 5. Realisasi Output : Tersedianya rekening langganan telepon, listrik dan air selama 12 bulan.
- 6. Kinerja Output : 100%
- 7. Permasalahan : Kantor Dinas yang masih menumpang di gedung BPPKAD sehingga biaya pemakaian listrik dan telepon tidak bisa di perkirakan
- 8. Solusi : Penyesuaian pada perencanaan anggaran tahun selanjutnya

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- 1. Jumlah Anggaran : 4.093.000
- 2. Realisasi Anggaran : 4.093.000
- 3. Kinerja Anggaran : 100 %
- 4. Rencana Output : Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- 5. Realisasi Output : Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- 6. Kinerja Output : 100%
- 7. Permasalahan :
- 8. Solusi :



3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- 1. Jumlah Anggaran : 90.981.800
- 2. Realisasi Anggaran : 90.545.454
- 3. Kinerja Anggaran : 99.52%
- 4. Rencana Output : Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan
- 5. Realisasi Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan.
- 6. Kinerja Output : 100%
- 7. Permasalahan :
- 8. Solusi :

4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- 1. Jumlah Anggaran : 49.185.600
- 2. Realisasi Anggaran : 49.185.600
- 3. Kinerja Anggaran : 100 %
- 4. Rencana Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 3 unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 6 unit
- 5. Realisasi Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 3 unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 6 unit
- 6. Kinerja Output : 100%
- 7. Permasalahan :
- 8. Solusi :

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- 1. Jumlah Anggaran : 21.983.000
- 2. Realisasi Anggaran : 21.975.403
- 3. Kinerja Anggaran : 99.97%
- 4. Rencana Output : Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 5. Realisasi Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

- 6. Kinerja Output : 100%
- 7. Permasalahan :
- 8. Solusi :

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
  - 1. Jumlah Anggaran : 282.848.400
  - 2. Realisasi Anggaran : 257.808.900
  - 3. Kinerja Anggaran : 91.15 %
  - 4. Rencana Output : Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - 5. Realisasi Output : peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
  - 6. Kinerja Output : 100%
  - 7. Permasalahan : Ada sisa pengadaan pembelian komputer
  - 8. Solusi : Penyesuaian pada perencanaan selanjutnya

6) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
  - 1. Jumlah Anggaran : 5.700.000
  - 2. Realisasi Anggaran : 4.923.000
  - 3. Kinerja Anggaran : 86.37 %
  - 4. Rencana Output : Diklat Penanaman Modal dan Perizinan 10 OH
  - 5. Realisasi Output : Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan petugas tentang Penanaman Modal dan Perizinan
  - 6. Kinerja Output : 100%
  - 7. Permasalahan : Adanya pandemi Covid 2019
  - 8. Solusi : Penyesuaian pada perencanaan selanjutnya

7) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
  - 1. Jumlah Anggaran : 12.292.000
  - 2. Realisasi Anggaran : 12.291.400
  - 3. Kinerja Anggaran : 99.99%
  - 4. Rencana Output : Penyusunan dokumen Renja, RKA, /DPA, LAKIP, LKPJ, DPPA, LPPD sebanyak 10 dokumen.

- 5. Realisasi Output : Tersusunnya dokumen Renja, RKA,/DPA, LAKIP, LKPJ, DPPA, LPPD sebanyak 10 dokumen.
- 6. Kinerja Output : 100%
- 7. Permasalahan :
- 8. Solusi :

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- 1. Jumlah Anggaran : 4.455.200
- 2. Realisasi Anggaran : 4.455.200
- 3. Kinerja Anggaran : 100%
- 4. Rencana Output : Penyediaan dokumen Data Dasar bidang Penanaman Modal dan Perizinan 1 dokumen.
- 5. Realisasi Output : Tersedianya dokumen Data Dasar bidang Penanaman Modal dan Perizinan 1 dokumen.
- 6. Kinerja Output : 100%
- 7. Permasalahan :
- 8. Solusi :

2. Program Promosi Penanaman Modal

- 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
    - Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
    - 1. Jumlah Anggaran : 81.765.200
    - 2. Realisasi Anggaran : 81.461.600
    - 3. Kinerja Anggaran : 99.6 %
    - 4. Rencana Output : Mengikuti kegiatan yang mendukung pameran dan kerjasama investasi
    - 5. Realisasi Output : Kegiatan pendukung pameran dan kerjasama investasi yang diikuti
    - 6. Kinerja Output : 100%
    - 7. Permasalahan : Belanja premi asuransi untuk pegawai Non-PNS sisa Rp. 295.200 dikarenakan ada sisa pembayaran dan pembayaran BPJS bulan November-Desember dibayarkan dengan uang sisa pembayaran tersebut.
    - 8. Solusi : Penyesuaian pada perencanaan selanjutnya

### 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- 1. Jumlah Anggaran : 20.562.200
- 2. Realisasi Anggaran : 20.450.850
- 3. Kinerja Anggaran : 99.5 %
- 4. Rencana Output :
  - 1. Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
  - 2. Laporan Kegiatan Wasdal (Monitoring LKPM)
- 5. Realisasi Output :
  - 1. Terlaksananya koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
  - 2. Tersusunnya laporan Kegiatan Wasdal (Monitoring LKPM)
- 6. Kinerja Output : 99.46%
- 7. Permasalahan :
- 8. Solusi :

### 4. Program Pelayanan Penanaman Modal

1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- 1. Jumlah Anggaran : 134.422.400
- 2. Realisasi Anggaran : 133.043.450
- 3. Kinerja Anggaran : 98.97 %
- 4. Rencana Output :
  - Cetak Blangko Perizinan
  - Peninjauan Lokasi Perizinan
  - Pembuatan Stiker Tanda Izin
  - Rakor Tim
- 5. Realisasi Output :
  - Cetak Blangko Perizinan
  - Peninjauan Lokasi Perizinan
  - Pembuatan Stiker Tanda Izin
  - Rakor Tim
- 6. Kinerja Output : 100%
- 7. Permasalahan :
- 8. Solusi :

b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- 1. Jumlah Anggaran : 121.920.800
- 2. Realisasi Anggaran : 121.472.500
- 3. Kinerja Anggaran : 99.6 %

- 4. Rencana Output : Data Informasi dan Rekomendasi hasil monev  
Focus Group Discussion  
Jasa Perseorangan  
Pemutihan IMB
- 5. Realisasi Output : Data Informasi dan Rekomendasi hasil monev, Focus Group Discussion, Jasa Perseorangan, Pemutihan IMB
- 6. Kinerja Output : 100 %
- 7. Permasalahan :
- 8. Solusi :

c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- 1. Jumlah Anggaran : 12.861.400
- 2. Realisasi Anggaran : 12.846.400
- 3. Kinerja Anggaran : 99.88%
- 4. Rencana Output : Persentase Jumlah Perizinan yang Dilayani Perubahan dan Penyusunan Regulasi PM / Perizinan  
Pertumbuhan nilai investasi
- 5. Realisasi Output : Persentase Jumlah Perizinan yang Dilayani Perubahan dan Penyusunan Regulasi PM / Perizinan  
Pertumbuhan nilai investasi
- 6. Kinerja Output : 100%
- 7. Permasalahan :
- 8. Solusi :

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    - Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
    - 1. Jumlah Anggaran : 152.721.400
    - 2. Realisasi Anggaran : 152.272.294
    - 3. Kinerja Anggaran : 99.71%
    - 4. Rencana Output : Pemeliharaan Aplikasi SIM Perizinan  
Jasa Perorangan Staf Operator SIM Perizinan  
Jasa Perorangan Staf Pengolahan Data Perizinan  
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    - 5. Realisasi Output : Pemeliharaan Aplikasi SIM Perizinan  
Jasa Perorangan Staf Operator SIM Perizinan  
Jasa Perorangan Staf Pengolahan Data Perizinan  
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

- 6. Kinerja Output : 100%
- 7. Permasalahan :
- 8. Solusi :

Capaian kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 rata – rata mencapai 96,74 %. Tingkat capaian tersebut berdasarkan realisasi program dan kegiatan dengan target kinerja yang telah direncanakan.

TABEL T-C. 29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Kabupaten Purworejo

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
Bidang Urusan Penanaman Modal									
<b>Program Peningkatan Promosi investasi</b>	<b>Prosentase Peningkatan Nilai Investasi</b>		369.201.200	102.327.400	101.912.450	99,59			
<i>Program (Baru)</i>									
<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Peningkatan nilai investasi</b>	<b>2%</b>					192.170.000	192.170.000	100
<i>Kegiatan (lama)</i>									
Pengembangan Penanaman Modal	Operasional Klinik Investasi, Koordinasi PM, Forum Pengembangan PM		52.016.480	20.562.200	20.450.850	99,46			
Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Operasional Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, Temu Investor.		71.363.800						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Promosi dan Kerjasama Investasi	Promosi CJIBF, Pameran di Jawa, Pameran Purworejo Expo.		214.263.220	81.765.200	81.461.600	99,63			
Forum Komunikasi PTSP	Sinkronisasi PTSP, Forum PTSP		31.557.700						
<b>Kegiatan (baru)</b>									
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	2%							
Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Pelaksanaan Promosi CJIBF, Pelaksanaan Pameran di Jawa , Pelaksanaan Pameran Purworejo Expo, Mengikuti kegiatan pendukung pameran dan kerjasama investasi, Audio Visual Potensi dan Profil Investasi	12 bulan, 1 kali.							
<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>	<b>Prosentase Jumlah Perizinan yang dilayani</b>		600.032.624	421.926.000	420.634.644	99,69	383.310.000		
<b>Program (Baru)</b>									
<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Jumlah Perizinan yang Dilayani</b>	100%					383.310.000	383.310.000	100
<b>Kegiatan (lama)</b>									
Pelayanan Perizinan	Cetak blangko perizinan, Peninjauan lokasi Perizinan, Pembuatan stiker/tanda izin, Rakor Tim, Jasa Perorangan, Penerbitan Izin.		314.373.575	134.422.400	134.043.450	99,72			
Intensifikasi Pelayanan Perizinan	Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat		48.591.600						



Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan	Pemeliharaan Aplikasi SIM Perizinan, Peningkatan Sistem Informasi Perizinan, Jasa Perseorangan, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Pemeliharaan rutin/berkala Arsip.		117.871.849	152.721.400	152.272.294	99,71			
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	Data Informasi dan Rekomendasi hasil monev., Layanan Pengaduan		103.646.300	121.920.800	121.472.500	99,63			
Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan	Perubahan dan Penyusunan Regulasi PM / Perizinan		15.549.300	12.861.400	12.846.400	99,88			
<b>Kegiatan (baru)</b>									
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Cetak Stopmap Kop Dinas, Peninjauan lokasi Perizinan, Pembuatan stiker/tanda izin, Rakor Tim, Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat, Jasa Perorangan.						383.310.000	383.310.000	100
<b>Sub Kegiatan .....</b>									
Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Cetak Stopmap Kop Dinas, Peninjauan lokasi Perizinan, Pembuatan stiker/tanda izin, Rakor Tim, Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat, Jasa Perorangan.	12 Bulan					242.560.000	242.560.000	100
Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Data Informasi dan Rekomendasi hasil monev, Jasa Perseorangan, Focus Group Discussion, Rapat Tim	1 Dokumen					128.250.000	128.250.000	100
Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan Non perizinan	Perubahan dan Penyusunan Regulasi PM / Perizinan, Pelayanan Pengaduan	1 Dokumen					12.500.000	12.500.000	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>Program (Baru)</b>									
<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Persentase Peningkatan nilai investasi	100%					61.780.900	61.780.900	100
<b>Kegiatan (baru)</b>									
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Klinik Investasi, Koordinasi PM, Forum Pengembangan PM						61.780.900	61.780.900	100
<b>Sub Kegiatan .....</b>									
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Operasional Klinik Investasi, Koordinasi PM, Forum Pengembangan PM	12 bulan, 1 kali.					61.780.900	61.780.900	100
<b>Program (Baru)</b>									
<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Persentase Jumlah Perizinan yang Dilayani	100%					<b>96.100.000</b>	<b>96.100.000</b>	100
<b>Kegiatan (baru)</b>									
Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan, Pemeliharaan Arsip, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Pembayaran Jasa Pihak ketiga.						96.100.000	96.100.000	100
<b>Sub Kegiatan</b>									
Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan, Pemeliharaan Arsip, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Pembayaran Jasa Pihak ketiga.	12 bulan					96.100.000	96.100.000	100
<b>Program Fasilitas Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral</b>	Fasilitas ESDM		8.750.000						
Fasilitas Sektor Sumber Daya Mineral	Fasilitas ESDM		8.750.000						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>		206.850.621	151.119.400	147.298.184	97,47			
<i>Kegiatan (lama)</i>									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan surat keluar dan masuk		3.670.300	26.848.600	26.839.600	99,97			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening langganan Telepon, Internet, Listrik dan air		24.662.721	29.196.000	25.820.130	88,44			
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor (ATK)		12.833.100						
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kwitansi, Penggandaan		7.695.800						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik		3.771.800						
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar dan Buku		1.693.800						
Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum harian, Rapat dan Tamu		41.407.100						
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		101.468.000						
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		7.995.000	90.981.800	90.545.454	99,52			
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih		1.653.000	4.093.000	4.093.000	100,00			
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik</b>		<b>183.991.340</b>	<b>354.017.000</b>	<b>328.969.903</b>	<b>92,92</b>			
<i>Kegiatan (lama)</i>									
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	AC, Laptop, PC, Printer, Scanner, LCD, UPS 4000 VA, Cable UTP CAT 5e 1000 feet, Connector RJ 45.		93.243.300	282.848.400	257.808.900	91,15			
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor, Rehab. Tempat Parkir		19.130.000						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 4, Pemeliharaan kendaraan roda 2, Jasa Perseorangan		47.080.440	49.185.600	49.185.600	100,00			
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Komputer/PC, Laptop, Printer, AC, LCD Proyektor, PABX, Runningtexts, Faksimile, Fingerprint		15.065.000	21.983.000	21.983.000	100,00			
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase capaian kinerja dan keuangan</b>		24.132.700	14.741.600	14.741.000	100,00			
<i>Kegiatan (lama)</i>									
Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan OPD		8.310.400	2.449.600	2.449.600	100,00			
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Renja, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ, RKAP, DPPA, LPPD, RKO dan SPIP, Forum OPD		15.822.300	12.292.000	12.291.400	100,00			
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>		<b>21.428.230</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.923.000</b>	<b>86,37</b>			
<i>Kegiatan (lama)</i>									
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Diklat Penanaman Modal dan Perizinan		21.428.230	5.700.000	4.923.000	86,37			
<b>Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan</b>	<b>Prosentase tersedianya data dasar pembangunan</b>		7.500.000	4.455.200	4.455.200	100,00			
<i>Kegiatan (lama)</i>									
Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Data Dasar bidang Penanaman Modal dan Perizinan		7.500.000						
<i>Program (Baru)</i>									
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>	100%					3.201.413.236	3.201.413.236	100
<i>Kegiatan (baru)</i>									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan belanja pegawai						2.876.360.236	2.876.360.236	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Layanan belanja pegawai	1 Tahun					2.869.860.236	2.869.860.236	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2020)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen pelaporan keuangan	19 Dokumen					6.500.000	6.500.000	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							59.109.000	59.109.000	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan surat menyurat dan kearsipan	12 bulan					24.378.000	24.378.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan					30.500.000	30.500.000	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan kebersihan kantor	12 bulan					4.231.000	4.231.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah							142.000.400	142.000.400	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan					142.000.400	142.000.400	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							75.193.600	75.193.600	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	8 unit/tahun , 1 orang					49.785.600	49.785.600	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	7 unit/Tahun					25.408.000	25.408.000	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	10 OH					29.000.000	29.000.000	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							29.000.000	29.000.000	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	10 Dokumen					19.750.000	19.750.000	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen data dasar pembangunan	1 Dokumen					14.500.000	14.500.000	100
							5.250.000	5.250.000	100

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

#### - **Tugas Pokok :**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pelayanan pengaduan.

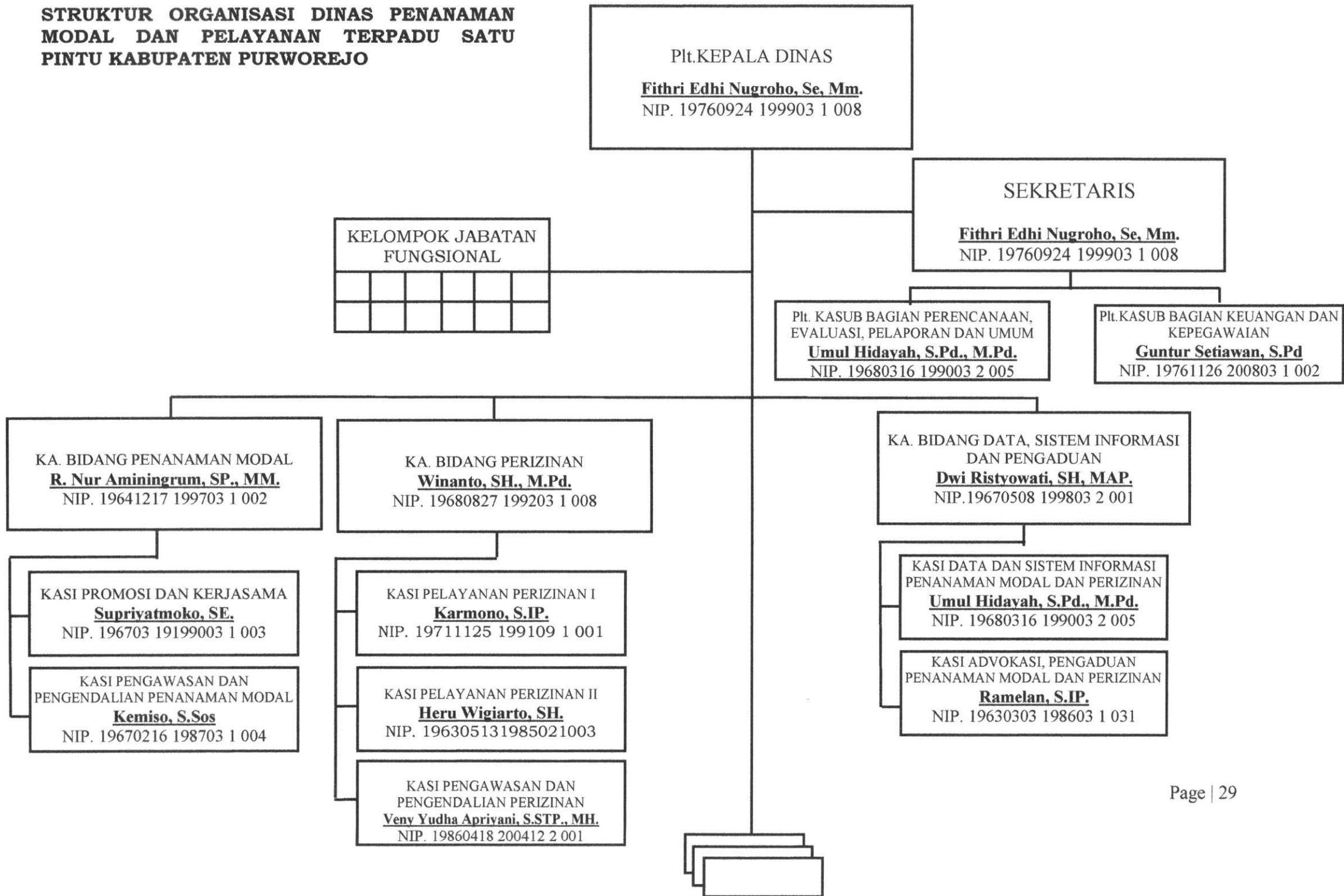
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

#### - **Fungsi**

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;

- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan DINPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO**





Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo melayani beberapa perizinan berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Ada 93 (sembilan puluh tiga ) Perizinan yang dilayani yaitu :

<b>NO</b>	<b>NAMA IZIN</b>
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2	IUJK (IZIN USAHA JASA KONTRUKSI)
3	IZIN PENYAMBUNGAN JALAN DENGAN JALAN UMUM
4	IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DENGAN LUAS SAMPAI 1000 M
5	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON FORMAL
6	LPK (IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA)
7	IZIN USAHA PERDAGANGAN
8	IZIN OPERASIONAL SIMPAN PINJAM KOPERASI
9	IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI
10	IZIN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
11	IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
12	IZIN PELAYANAN JASA PARAMEDIK VETERINER
13	IZIN JAGAL HEWAN
14	IZIN PENDIRIAN RUMAH PEMOTONG HEWAN
15	IZIN PENDIRIAN RUMAH PEMOTONG UNGGAS
16	IZIN LINGKUNGAN
17	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN
18	B3 (IZIN PENGUMPULAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)
19	PPLH (IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)
20	IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH
21	PKL (IZIN RISET SURVAI PENELITIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
22	LSM (IZIN RISET SURVEI PENELITIAN UNTUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT)

23	IZIN REKLAME BERKONTRUKSI
24	IZIN REKLAME NON KONTRUKSI DAN INSIDENTIL
25	IZIN WARUNG INTERNET DAN GAME NET
26	IZIN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
27	IZIN OPERASIONAL PANTI
28	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/BARANG
29	IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP
30	IZIN TRAYEK ANGKUTAN
31	IZIN USAHA ANGKUTAN
32	IZIN BONGKAR MUAT
33	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP SWASTA
34	IZIN PENDIRIAN PRASARANA OLAH RAGA
35	IZIN PEMAKAIAN/GELANGGANG OLAH RAGA
36	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
37	PAUD (IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
38	IZIN/REKOMENDASI KEGIATAN BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN DARI PIHAK LAIN
39	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
40	IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT
41	IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
42	IZIN MENDIRIKAN KLINIK
43	IZIN OPERASIONAL KLINIK
44	IZIN KLINIK PELAYANAN HEMODIALISIS
45	IZIN PENYELENGGARAAN RADIOLOGI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
46	UTD (IZIN PENYELENGGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH)
47	IZIN APOTEK
48	IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA
49	IZIN PENYELENGGARAAN OPTICAL
50	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
51	IZIN TOKO OBAT
52	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/GIGI SPESIALIS
53	SIPA (IZIN PRAKTEK APOTEKER)
54	SIPB DAN SIKIB (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA BIDAN)
55	SIPP DAN SIKP (IZIN PRAKTIK DN IZIN PERAWAT)

56	SIKPG DAN SIPP (IZIN PRAKTIK DAN IZIN PERAWAT GIGI)
57	SIKPAN DAN SIPPAN (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA PERAWAT ANESTHESI)
58	SIKTTK (IZIN TENAGA KERJA KEFARMASIAN)
59	SIPF DAN SIKF (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA FISIOTHERAPIS)
60	SIK-ALM(IZIN PENYELANGGARAAN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK)
61	SIK-E DAN SIPE (IZIN KERJA PRAKTIK ELEKTROMEDIS)
62	SIPTGZ DAN SIKTGZ (IZIN KERJA PRAKTIK TENAGA GIZI)
63	SIKTS (IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN)
64	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
65	SIKR (IZIN KERJA RADIO GRAFER)
66	SIKRO (IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETIS)
67	ISIPTKT (IZIN KERJA DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL)
68	IZIN USAHA MENENGAH OBAT TRADISIONAL
69	IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPTW)
70	IZIN KERJA DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIKOT&SIPOT)
71	IZIN PRAKTIK PSIKOLOG (SIPPK)
72	IZIN KERJA TENAGA AHLI KESEHATAN MASYARAKAT (SIK-KESMAS)
73	IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP-TTD)
<b>NO</b>	<b>DAFTAR NON PERIZINAN</b>
74	TDG (TANDA DAFTAR GUDANG)
75	STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL)
76	SPP-IRT (SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN-INDUSTRI RUMAH TANGGA)

Dalam melaksanakan pelayanan telah menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Perizinan), maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga masyarakat pemohon izin dapat mengetahui persyaratan maupun pengurusan perizinan dengan mudah, jelas, transparan dan tepat waktunya.

TABEL T-C. 30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Th. 2020 (thn n-2)	Th. 2021 (thn n-1)	Th. 2022 (thn n)	Th. 2023 (thn n+1)	Th. 2020 (thn n-2)	Th. 2021 (thn n-1)	Th. 2022 (thn n)	Th. 3023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal			2%	2%	10%	10%	86,63%		10%	10%	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik			100%	100%			96%		100%	100%	

## **2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

### **1. Lingkungan Internal**

#### **KEKUATAN (S):**

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
- b. Adanya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- c. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (e-permit);
- d. Tingginya komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- e. Kerjasama SDM di Internal DPMPTSP yang cukup baik;

#### **KELEMAHAN (W):**

- a. Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;
- b. Sarana dan prasarana kerja belum memadai;

### **2. Lingkungan Eksternal**

#### **PELUANG (O):**

1. Tersedianya potensi investasi di Kabupaten Purworejo;
2. Teknologi informasi berkembang pesat;
3. Operasionalisasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diharapkan oleh masyarakat;

4. Dukungan dari DPRD Kab. Purworejo dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima.

**ANCAMAN (T):**

1. Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
2. Koordinasi antar instansi Teknis dalam pemberian Perizinan belum optimal;
3. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Mekanisme dan tata cara pemberian perizinan di DPMPTSP Kab. Purworejo;
4. Adanya pungutan liar yang diakibatkan karena masyarakat tidak mengurus langsung perizinan di DPMPTSP (menggunakan jasa pihak ketiga);
5. Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD**

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil indentifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan Perangkat Daerah kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

TABEL T-C. 31  
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022  
Kabupaten Purworejo

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Peningkatan Nilai Investasi</b>	<b>5%</b>	<b>275.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Peningkatan Nilai Investasi</b>	<b>5%</b>	<b>186.068.000</b>	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Perda mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		100.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Perda mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		70.000.000	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Naskah Akademik Penyusunan Perda mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Naskah Akademik	100.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Naskah Akademik Penyusunan Perda mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Naskah Akademik	70.000.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten		175.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten		116.068.000	

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purworejo	-Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten -Road Map Implementasi RUPM	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purworejo	-Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten -Road Map Implementasi RUPM	1 dokumen	60.000.000	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Purworejo	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 dokumen	75.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kabupaten Purworejo	Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 dokumen	56.068.000	
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal</b>	<b>2%</b>	<b>311.387.000</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal</b>	<b>2%</b>	<b>192.170.000</b>	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah		311.387.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah		192.170.000	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	68.600.000	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jawa dan Luar Jawa	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah / Kabupaten	4 Event	211.387.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jawa dan Luar Jawa	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah / Kabupaten	4 Event	123.570.000	



<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>700.000.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan</b>	<b>1</b>	<b>439.799.000</b>	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Penyediaan Pelayanan, Pemantauan, Pemenuhan, Komitmen, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan		700.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Penyediaan Pelayanan, Pemantauan, Pemenuhan, Komitmen, Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan		439.799.000	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Purworejo	Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat,	4 Kali	350.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Purworejo	Penyuluhan Perizinan pada Masyarakat,	4 Kali	286.138.000	
		Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Perizinan	1 Paket				Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Perizinan	1 Paket		
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Dokumen Monev Pemenuhan Komitmen Perizinan Perusahaan dan UMKM	1 Dokumen	250.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Dokumen Monev Pemenuhan Komitmen Perizinan Perusahaan dan UMKM	1 Dokumen	123.750.000	

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Purworejo	Dokumen Penyelenggaraa n Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Purworejo	Dokumen Penyelenggaraa n Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	1 Dokumen	4.913.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Purworejo	Dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kabupaten Purworejo	Dokumen koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi	1 Dokumen	24.998.000	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan</b>	<b>100%</b>	<b>208.200.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan</b>	<b>1</b>	<b>208.200.000</b>	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal		208.200.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal		208.200.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Penanaman Modal dan Tersedianya Informasi Profil Hasil Pemantauan, Dokumen LKPM, dan Notula Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan	12 Bulan	50.820.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Penanaman Modal dan Tersedianya Informasi Profil Hasil Pemantauan, Dokumen LKPM, dan Notula Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan	12 Bulan	50.820.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kewajiban Penyampaian LKPM kepada Pelaku Usaha, Pemberian Konsultasi Pengisian LKPM Online, dan Forum Bisnis Penanaman Modal	4 kali.	67.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kewajiban Penyampaian LKPM kepada Pelaku Usaha, Pemberian Konsultasi Pengisian LKPM Online, dan Forum Bisnis Penanaman Modal	4 kali.	67.000.000	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dan Tersedianya Informasi Profil Hasil Pengawasan dan BAP	12 Bulan	90.380.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dan Tersedianya Informasi Profil Hasil Pengawasan dan BAP	12 Bulan	90.380.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Layanan Perizinan Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Prosentase Layanan Perizinan Terintegrasi</b>	<b>1</b>	<b>202.984.000</b>	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan		300.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan		202.984.000	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Purworejo	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	12 bulan	274.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Purworejo	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	12 bulan	202.984.000	

		Pemeliharaan Aplikasi Perizinan	12 Bulan	20.000.000			Pemeliharaan Aplikasi Perizinan	12 Bulan		
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen	6.000.000			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 Dokumen		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Layanan belanja pegawai	1	3.521.554.560	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Layanan belanja pegawai	1	3.201.413.236	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Layanan belanja pegawai		3.163.996.260	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Layanan belanja pegawai		2.876.360.236	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Layanan belanja pegawai	1 Tahun	3.156.846.260	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Layanan belanja pegawai	1 Tahun	2.869.860.236	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kabupaten Purworejo	Dokumen pelaporan keuangan	19 Dokumen	7.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kabupaten Purworejo	Dokumen pelaporan keuangan	19 Dokumen	6.500.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65.019.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59.109.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Purworejo	Layanan surat menyurat dan kearsipan	12 bulan	26.815.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Purworejo	Layanan surat menyurat dan kearsipan	12 bulan	24.378.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Purworejo	Layanan komunikasi, informasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	33.550.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Purworejo	Layanan komunikasi, informasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	30.500.000	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Purworejo	Layanan kebersihan kantor	12 bulan	4.654.100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Purworejo	Layanan kebersihan kantor	12 bulan	4.231.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		156.200.440	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		142.000.400	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purworejo	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	156.200.440	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Purworejo	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	142.000.400	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				82.712.960	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75.193.600	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Purworejo	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	unit/tahun , 1 orang	54.764.160	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Purworejo	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	8 unit/tahun , 1 orang	49.785.600	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	7 unit/Tahun	27.948.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Purworejo	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	7 unit/Tahun	25.408.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				31.900.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				29.000.000	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Purworejo	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	10 OH	31.900.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Purworejo	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	10 OH	29.000.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.725.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.750.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	10 Dokumen	15.950.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	10 Dokumen	14.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Dokumen data dasar pembangunan	1 Dokumen	5.775.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purworejo	Dokumen data dasar pembangunan	1 Dokumen	5.250.000	

### 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam forum Perangkat daerah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021 untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat tidak ada. Sehingga pada tahun anggaran 2022 usulan program dan kegiatan di dinas Pmptsp tidak dianggarkan sesuai tabel TC.32

TABEL T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2021

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

**NIHIL**



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Ada beberapa Kebijakan Nasional yang menjadi perhatian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya seperti:

- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang – undang yang mengatur tentang prinsip- prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi- fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik;
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

#### **3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Provinsi Jawa Tengah.**

Arah kebijakan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Prioritas Penanaman Modal sektor pangan, infrastruktur, energi dan Green Investment;
4. Membangun kemitraaan Penanaman Modal Usaha Besar dengan K-UMKM.

Dengan Strategi kebijakan Penanaman Modalnya yaitu :

1. Pelayanan Profesional, cepat, transparan, pasti dan ramah;
2. Pemberian kemudahan dan insentif Penanaman Modal Daerah;

3. Penguatan Task Force untuk pembinaan dan pengembangan Penanaman Modal;
4. Pengembangan kawasan industri dengan pendekatan regionalisasi pengembangan wilayah;
5. Peninmgkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

### **3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.**

#### **Tujuan**

Adapun tujuan Renja adalah sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

#### **Sasaran**

Terciptanya pelayanan yang berkualitas, berdaya saing dan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM).

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Peningkatan pelayanan perizinan dapat diukur dari capaian kinerja layanan berdasarkan peningkatan jumlah izin yang dikeluarkan setiap tahun dan Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) yang meningkat. Dari penjelasan tersebut diatas dapat dirumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan yang direncanakan untuk tahun 2022 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 3. Program Promosi Penanaman Modal
  - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
    - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
    - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
    - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5. Program Pelayanan Penanaman Modal
  - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    - a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    - b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
    - c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- 6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

TABEL 4.1  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama PD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	195.000.000	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	183.459.682	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	380.349.592	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	402.462.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	120.067.700	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.908.589.848	

Lokasi / sasaran Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2022 adalah Perangkat Daerah dan Masyarakat.

Detail Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat Pada Matriks Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

Matrik Rencana Kerja  
Tahun 2022  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2	18											8.189.928.822					
2	18 01											6.908.589.848					
2	18 01	2,01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										19.750.000				
2	18 01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Dokumen	36 Dokumen	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	6.500.000
2	18 01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	36 Dokumen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	2.000.000
2	18 01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	36 Dokumen	1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	2.000.000
2	18 01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	36 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	3.000.000
2	18 01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	36 Dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	3.000.000
2	18 01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	16 Laporan	36 Dokumen	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	3.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
2 18 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Dokumen	36 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	6.775.000	
<b>2 18 01 2,02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>2.662.929.148</b>						<b>3.469.971.260</b>	
2 18 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Gaji dan tunjangan ASN	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	2.640.157.148	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	3.456.846.260	
2 18 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	3.000.000	
2 18 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	100 %	18.772.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	7.125.000	
2 18 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	3.000.000	
<b>2 18 01 2,05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>29.000.000</b>						<b>35.000.000</b>	
2 18 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang / Kali	100 %	29.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	35.000.000	
<b>2 18 01 2,06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>142.000.400</b>						<b>161.200.000</b>	
2 18 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Layanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	142.000.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	161.200.000	
<b>2 18 01 2,07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>3.921.501.200</b>						<b>3.921.501.200</b>	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	905 Unit	5 Jenis	3.921.501.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	3.921.501.200
<b>2 18 01 2,08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>72.214.500</b>			<b>65.784.500</b>		
2 18 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	23.484.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	23.484.500
2 18 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	30.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	37.100.000
2 18 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	18.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	5.200.000
<b>2 18 01 2,09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>61.194.600</b>			<b>92.970.000</b>		
2 18 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Unit	2 jenis	35.786.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	58.450.000
2 18 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor/Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 Unit	2 jenis	25.408.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	34.520.000
<b>2 18 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>								<b>195.000.000</b>			<b>214.500.000</b>		
<b>2 18 02 2,01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>195.000.000</b>			<b>214.500.000</b>		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	18	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	Regulasi mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersusunnya Naskah Akademik Tentang Pemberian Insentif di Bidang Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	195.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	5 %	214.500.000
<b>2 18 03</b>					<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>				<b>183.459.682</b>									
<b>2 18 03</b>					<b>2,01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>183.459.682</b>				<b>342.525.700</b>					
2	18	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan	Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya Izin Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,5 %	1 Dokumen	99,5 %	59.889.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan	99,5 %	110.000.000
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah / Kabupaten	Terlaksananya Izin Usaha Terhadap Kepeminatan Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,5 %	4 Event	99,5 %	123.569.982	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Izin Usaha Terhadap Jumlah Kepeminatan	99,5 %	232.525.700
<b>2 18 04</b>					<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>				<b>380.349.592</b>				<b>536.117.652</b>					
<b>2 18 04</b>					<b>2,01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah</b>				<b>380.349.592</b>				<b>536.117.652</b>					
2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Pelayanan Perizinan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Perizinan Penyuluhan Perizinan Pada Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Mendukung Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan 1 paket 4 Kali	100 %	217.375.992	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100 %	229.375.992
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Hasil Monev Pemenuhan Komitmen Perizinan Perusahaan dan UMKM	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Mendukung Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	125.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100 %	275.000.000
2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Hasil Penyelenggaraan Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Mendukung Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	12.913.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100 %	5.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2 18 04 2,01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Mendukung Penanaman Modal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	24.310.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan	100 %	26.741.660	
<b>2 18 05</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>						<b>402.462.000</b>						<b>458.583.089</b>	
<b>2 18 05 2,01</b>		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>402.462.000</b>							<b>458.583.089</b>
2 18 05 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentasae Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Penanaman Modal	Terpenuhinya Ketentuan Perizinan pada Perusahaan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	50.215.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	100 %	55.820.000	
2 18 05 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentasae Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal	Terpenuhinya Ketentuan Perizinan pada Perusahaan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	275.802.808	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	100 %	303.383.089	
2 18 05 2,01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentasae Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Terpenuhinya Ketentuan Perizinan pada Perusahaan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 %	76.443.692	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentasae Usaha Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	100 %	99.380.000	
<b>2 18 06</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>						<b>120.067.700</b>						<b>202.000.000</b>	
<b>2 18 06 2,01</b>		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>120.067.700</b>							<b>202.000.000</b>
2 18 06 2,01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Layanan Perizinan Terintegrasi	Pemeliharaan Aplikasi Perizinan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Terkelolanya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan 12 bulan	1 Dokumen	120.067.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Perizinan Terintegrasi	100 %	202.000.000	
<b>TOTAL</b>									<b>8.189.928.822</b>					<b>9.526.428.401</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Tema Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah Melanjutkan Pembangunan Menuju Masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera berbasis Agrobisnis.

Rancangan Rencana Kerja yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai satu persepsi tentang rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal.

Rancangan Rencana Kerja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Renstra perangkat daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tahun 2022 disusun untuk memberikan gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada Renja tersebut perlu didukung oleh anggaran, Sumber Daya Manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga Rancangan Renja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Purworejo, 14 Juli 2021

Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Purworejo

Sekretaris

  
**FITHRI EDHI NUGROHO, SE, MM**

Pembina

NIP. 19760924 199903 1 008